



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Subali alias Subali Kasori alias Kasori Bin Dasimun, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ploengan RT. 001 RW. 005, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Muayah Binti Amad Buang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ploengan RT. 001 RW. 005, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 64/Pdt.P/2022/PA.Ba tanggal 25

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada tanggal 02 September 1997, sebagaimana termuat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara Nomor : 184/08/IX/97 tertanggal 02 September 1997 dan dikaruniai 2 orang anak, anak pertama perempuan yaitu Kholi Setyaningsih Binti Subali Alias Subali Kasori Alias Kasori NIK 3304186202040003 Tempat,tanggal lahir Banjarnegara, 22-02-2004 Umur 17 tahun 11 Bulan Agama Islam Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Pendidikan SMP Tempat tinggal Desa Plorengan RT. 001 RW. 005 Kecamatan Kalibening, iKabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa anak para pemohon (Kholi Setyaningsih Binti Subali Alias Subali Kasori Alias Kasori) kini telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki yaitu Misnur Bin Sunanto Kuat Alias Sumanto Alias Kuat NIK 3304181209960002 Tempat,tanggal lahir Banjarnegara, 12-09-1996 Umur 26 tahun Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Pendidikan SMK Tempat tinggal :Desa Plorengan RT 003 RW 005 Kecamatan Kalibening, IKabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa anak Para Pemohon (Kholi Setyaningsih Binti Subali alias Subali Kasori Alias Kasori) berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon (Misnur Bin Sunanto Kuat Alias Sumanto Alias Kuat) berstatus jejak;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon (Kholi Setyaningsih Binti Subali Alias Subali Kasori Alias Kasori) yang belum berusia 19 tahun dan baru berumur 17 tahun 11 bulan.;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon (Kholi Setyaningsih Binti Subali Alias Subali Kasori Alias Kasori) dan calon suami anak Para Pemohon (Misnur Bin Sunanto Kuat Alias Sumanto Alias Kuat) tidak ada larangan syar,i untuk melakukan pernikahan.;
6. Bahwa anak Para Pemohon (Kholi Setyaningsih Binti Subali Alias Subali Kasori Alias Kasori) meskipun baru berusia 17 tahun 11 bulan namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.;

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa begitu pula calon suami anak Para Pemohon (Misnur Bin Sunanto Kuat Alias Sumanto Alias Kuat) telah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dengan penghasilan yang cukup sebagai Petani dan mempunyai lahan sendiri dan mampu untuk berumahtangga;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langungkan karena keduanya telah menjalin cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga di khawatirkan bisa terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
9. Bahwa pada bulan 12 Oktober 2021 keluarga dari calon suami anak Para Pemohon telah meminang anak Para Pemohon (Kholi Setyaningsih Binti Subali Alias Subali Kasori Alias Kasori) dan Para Pemohon telah menerima pinangan tersebut, serta telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa orang tua calon suami (Misnur Bin Sunanto Kuat Alias Sumanto Alias Kuat) dan Para Pemohon (Subali Alias Subali Kasori Alias Kasori Bin Dasimun) telah mengetahui usia keduanya sekarang ini, dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;
11. Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi hasilnya di tolak dengan nomor penolakan: 20/Kua.11.04.05/PW.01/1/2022, tertanggal 19 Januari 2022 dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang kecuali Para Pemohon telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Banjarnegara;
12. Bahwa dengan demikian alasan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya sudah selayaknya Permohonan Para Pemohon untuk di kabulkan.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Kholi Setyaningsih Binti Subali alias Subali Kasori Alias Kasori untuk menikah dengan calon suami yang bernama Misnur Bin Sunanto Kuat Alias Sumanto Alias Kuat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.-

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori, Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat dan orangtua Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang,, tempat tinggal di Desa Plorengan RT. 003 RW. 005,

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304180106750001 tanggal 06 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3304184803810001 tanggal 19 September 2012., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. FotokopiKartu Keluarga Nomor 3304181108040110 tanggal 13 Pebruari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. FotokopiAkta Kelahiran nomor 21245/TP/2009 tanggal 07 Pebruari 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304186202040003 tanggal 03 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kalibening. tanggal.05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. FotokopiAkta Kelahiran calon suami nomor 3304-LT-01042014-0038 tanggal 01 April 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami NIK 3304181209960002 tanggal 22 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami NIK 3304182906730001 tanggal 06 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Surat Penolakan Nomor 20/Kua.11.043.05/PW.01/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori, Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat dan orangtua Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori telah dilamar oleh Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat pada bulan .Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori telah dilamar oleh Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat pada bulan .Oktober 2021;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا
وَجَدْتَ كُفْرًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Kholi Setyaningsih binti Subali alias Subali Kasori alias Kasori untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Misnur bin Sunanto Kuat alias Sunanto alias Kuat ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rojab 1443 H H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hidayati, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nangim, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba



Panitera Pengganti,

Hidayati, Sm.Hk.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	260.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 64/Pdt.P/2022/PA.Ba